

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2025

DINAS
KOPERASI
DAN UKM

User x

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

Laporan ini disusun dengan mendasar pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2029 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan dalam urusan wajib di Bidang Koperasi dan UKM. Isi laporan ini menunjukkan gambaran sejauh mana kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Meskipun segala upaya telah dilakukan namun laporan ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya kami menuju kesempurnaan LKIP ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 kami sampaikan untuk diperiksa. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberi manfaat, amien.

Lolak, Januari 2025
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Bolaang Mongondow



OFIR RATU, SPd. MM.

NIP . 19681029 199208 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	1
B. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. BOLMONG	2
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 3
A. PERENCANAAN STRATEGIS	3
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	5
 BAB III AKUTANBILITAS KINERJA	 6
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	6
1. PENGUKURAN KINERJA	6
i. Metode Pengukuran Kinerja	6
ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran	7
2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN	8
i.8	
3. PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN	17
B. REALISASI ANGGARAN	18
1. Anggaran dan Realisasi APBD	18
2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan	19
 BAB IV PENUTUP	 21
LAMPIRAN	
Lampiran I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Lampiran II PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2025	
Lampiran III. PRESTASI KERJA	

BAB. I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, kepala Dinas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai sub system dari system Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabuptaen, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow diwajibkan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dins Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.1. DATA UMUM ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah. Dan telah ditetapkan kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A.

Terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretarian membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Staf
 - b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
- 3. Bidang Perizinan KSP/USP Pengawasan dan Pemeriksaan :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi
 - b. Fungsional Pengawas Koperasi
- 4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro terdiri dari:
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi
 - b. Fungsional Pengawas Koperasi
- 5. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi terdiri dari:
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi
 - b. Fungsional Pengawas Koperasi
- 6. Bidang Penilaian Koperasi SP / Unit Simpan Pinjam terdiri dari:
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi
 - b. Fungsional Pengawas Koperasi

Status Kepegawaian

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow dengan status ASN berjumlah 16 orang (PNS), P3K berjumlah 1 orang dan 2 orang (Non PNS), dengan rincian sebagai berikut :

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
Golongan IV	6 Orang
Golongan III	8 Orang
Golongan II	2 Orang
Jumlah	16 Orang

Gol IV/c	Gol IV/b	Gol IV/a	Gol III/d	Gol III/c	Gol III/b	Gol III/a	Gol II/c	Gol II/a
1	2	3	4	1	1	2	1	1

PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	1
S1	11
SLTA	4

1. Berdasarkan Jabatan Struktural

- 1) Kepala Dinas

Eselon II : 1 Orang
- 2) Sekretaris

Eselon IIIa : 1 Orang
- 3) Kepala Bidang

Eselon IIIb : 4 Orang
- 4) Kepala Sub Bagian

Eselon IVa : 2 Orang

2. Kelompok Pejabat Fungsional

: 1 Orang

3. Pelaksana

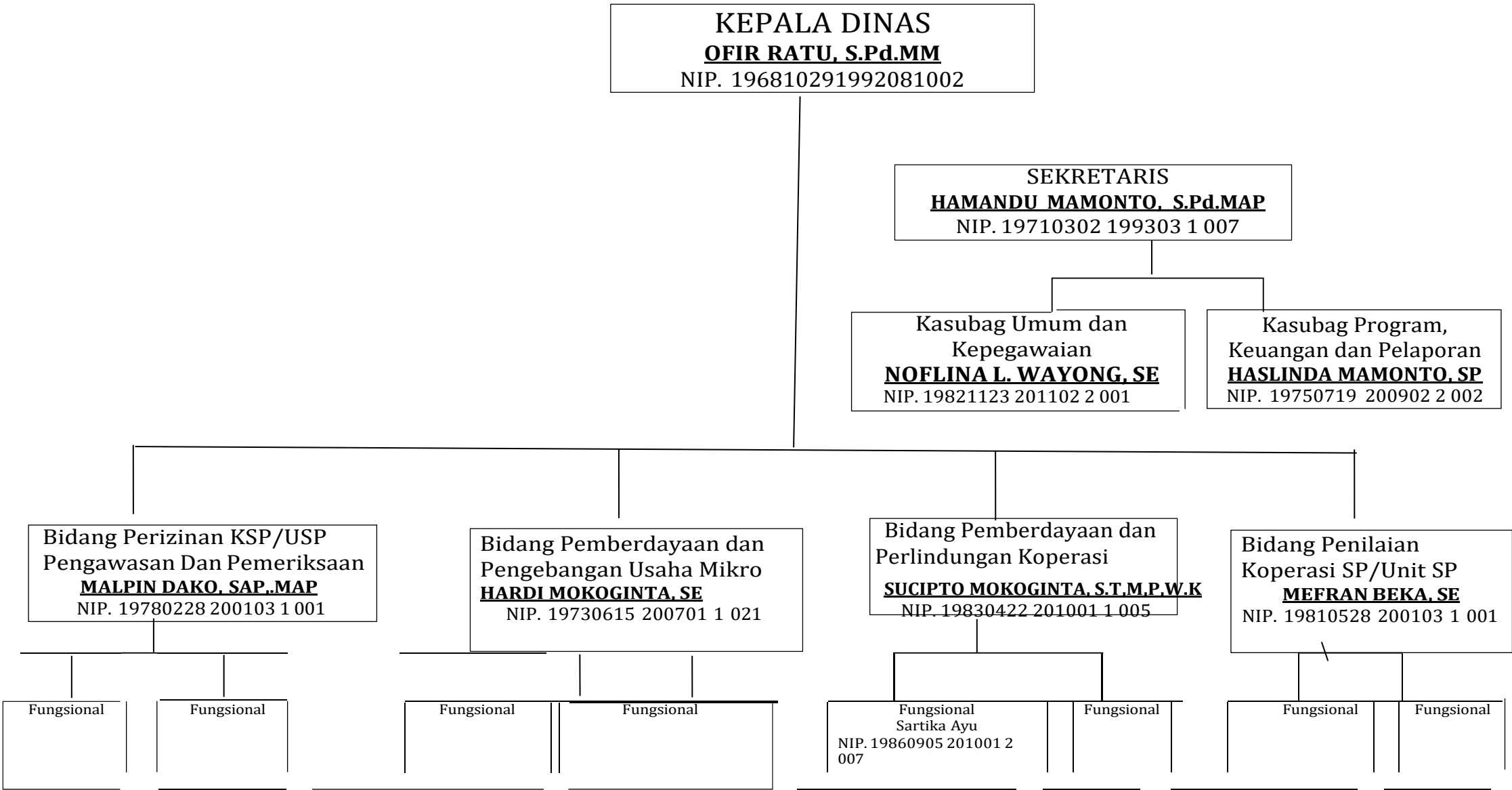
: 7 Orang

4. Tenaga Harian Lepas (THL) / Non PNS

Jumlah THL / Non PNS

: 2 Orang

(GAMBAR STRKTUR ORGANISASI OPD)



1.2. **PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

Permasalahan yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 – 2029 dan Renja Tahun 2025, dihadapkan pada beberapa hal berikut :

a. **Permasalahan Utama**

Permasalah Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel. 3.1

Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Perencanaan Pembangunan		
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Gedung Kantor Belum ada masih status pinjam	Dana Belum ada
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah Koperasi yang tidak terdata di Dinas Koperasi	Kurangnya Kesadaran dari Koperasi untuk melapor ke Dinas terkait
	Masih Kurangnya Kesadaran Koperasi untuk melaksanakan RAT	Rendahnya Pengetahuan dan Pemahaman pengurus dalam pengelolaan koperasi	Kurangnya SDM yang ada
	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Kurang profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi	Kurangnya SDM yang ada
	Kurangnya pendataan terhadap Usaha Kecil dan Menengah	Perlu adanya pendataan bagi koperasi dan UKM	Kurangnya anggaran bagi koperasi dan UKM
	Kurangnya Kemampuan UKM untuk memasarkan hasil produknya ke masyarakat	Kurangnya modal usaha koperasi dan UKM	Kurangnya SDM yang ada
	Data Base koperasi dan UMKM yang belum lengkap	Pendataan yang tidak Optima	Minimnya dana dan SDM yang ada
	Masih banyak koperasi yang tidak aktif	Lemahnya pengetahuan pengurus dan pengawas tentang manajemen Koperasi	Kurangnya SDM yang ada

b. Isu Strategis

Yang menjadi Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diantaranya :

- Rendahnya Persentase Koperasi yang aktif;
- Rendahnya system pengendalian intern koperasi dalam pengendalian manajemen koperasi, pengawas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak maksimal;
- Rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan manajemen koperasi dan Usaha Mikro;
- Terbatasnya promosi produk usaha mikro;
- Terbatasnya permodalan dan pemasaran produk usaha mikro.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2023 – 2026 adalah :

“Bolaang Mongondow Juara, Bolaang Mongondow Maju dan Sejahtera ”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 – 2029 tersebut dirumuskan melalui 5 misi pembangunan yaitu:

1. Mengembangkan sumberdaya manusia unggul di Bolaang Mongondow melalui penguatan mutu layanan pendidikan gratis, berkelanjutan dan layanan kesehatan holistik dan inklusif,
2. Meningkatkan infrastruktur Daerah berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan,
3. Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih dan Transparan,
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan membangun Perekonomian yang kreatif, inovatif, berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal,
5. Menjadikan Kehidupan Masyarakat lebih Harmonis dan Toleran.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian daerah yang Mandiri Bertumpu pada Potensi Sumberdaya Lokal

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Daerah

Sasaran : - Meningkatnya Kualitas UKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Sasaran : Kontribusi UKM terhadap Total PDRB

dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1. Target Tujuan Sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Tujuan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
						2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkat Kontribusi UKM dalam Perekonomian	Kontribusi UKM Terhadap PDRB	19	Kontribusi UKM Terhadap total PDRB	Persen	59	69	79	89	99

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM tahun 2025-2029, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Tabel 2.3
Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	Kontribusi UKM terhadap total PDRB	Persen	59	. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	24.165.015
				- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.165.015
				- Program Penilaian Koperasi KSP/USP Koperasi	38.864.994
				- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.864.994
				- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	6.599.787
				- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.599.787
				- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	20.045.056
				- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4.961.100
				- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15.083.956

Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

C. REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

Adapun Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA	TARGET
1	Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	Persen	$KUKMTTPDRB = \frac{OUKMP\overline{THN}}{TPDRB} \times 100 \%$	59

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

i. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk

masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85 = Sangat berhasil

$70 < X \leq 85$ = Berhasil

$55 < X \leq 70$ = Cukup Berhasil

≤ 55 = Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”.

Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

	Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai <i>mean</i> setiap kategori
Capaian Sasaran =	$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori x Nilai } mean \text{ setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN



Pengukuran capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan Kualitas UKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja sasaran : “meningkatkan Kualitas UKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat” dengan indikator sasaran Kontribusi UKM terhadap Total PDRB dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{O_{UKM} \times P_{THN}}{TPDRB} \times 100$$

Ket :

$KUKMTTPDRB$ = Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB
 $OUMKMPTHN$ = Output UKM Per Tahun
 $TPDRB$ = Total PDRB Nilai Konstan (menurut Lapangan Usaha)

Perolehan Kontribusi UKM terhadap Total PDRB dapat dilihat jumlah kontribusi UKM tahun berjalan di bagi total produk domestic bruto dan dikali 100. Jadi untuk menghitung Kontribusi UKM terhadap total PDRB Kabupaten Mongondow sesuai table berikut :

Tabel 3.1
PERHITUNGAN KONTRIBUSI UKM TERHADAP TOTAL PDRB
KABUPATEN BOLAANG MONGONNDOW

Kontribusi UKM Tahun 2025	Nilai PDRB 2025
89.674.852	12.539.06

Sumber Data BPS. Bolmong Tahun 2024

Dari Tabel diatas kita menghitung KUKMTTPDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 yaitu :

$$KUKMTTPDRB = \frac{89.674.852}{12.539.06} \times 100 = 71.52\%$$

Kontribusi UKM diatas diambil dari jumlah total PDRB Harga Konstan Lapangan Usaha Tahun 2024

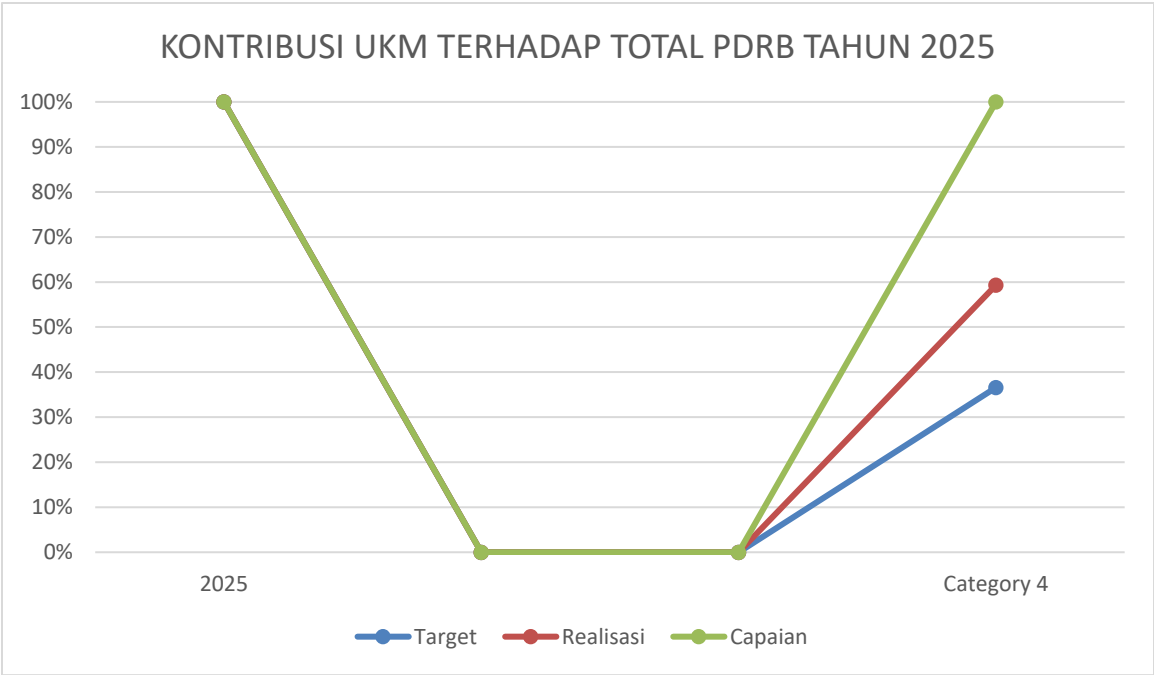
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

N O	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	59	71,52	121.22 %

Capaian indikator Kontribusi UKM terhadap total PDRB berdasarkan Tabel

diatas pada tahun 2025 dari perhitungan Kontribusi UKM terhadap total PDRB dari target 59 terealisasi 71.52 % dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah 121.22%



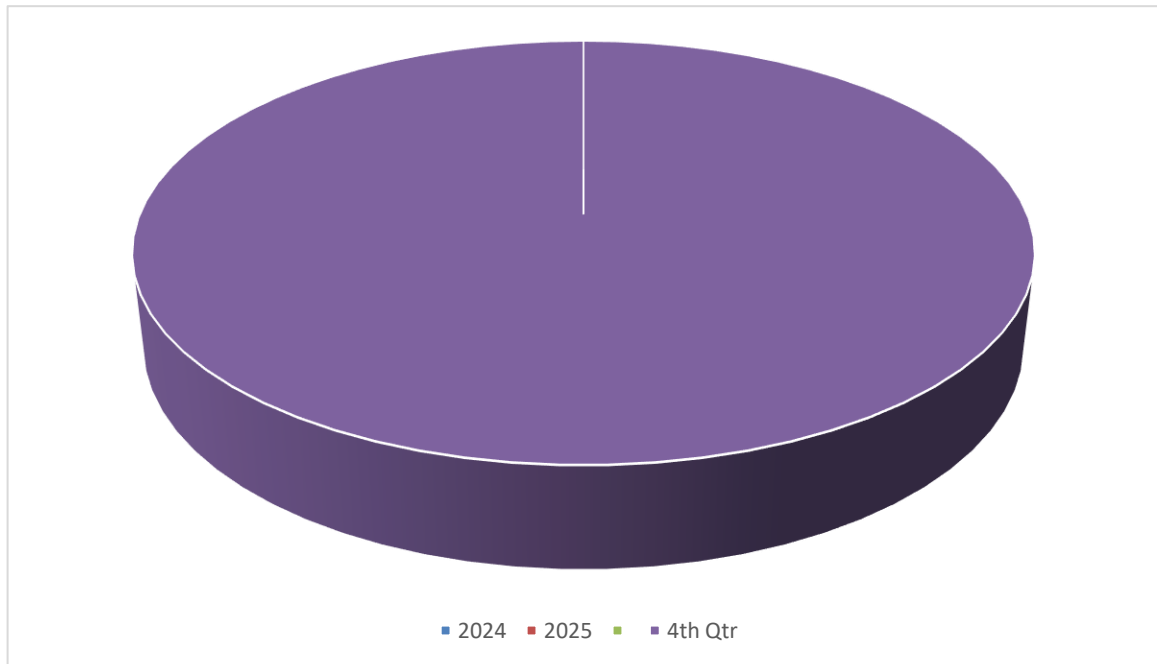
2. Membandingka antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 3.3

Membandingkan realisasi antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lau dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3 Kontribusi UKM terhadap Total PDRB

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Terhadap Target 2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	21	37.83	180.14	59	71.52	121.22



Dari tabel di atas kita bisa menghitung (Penjelasan terhadap Capaian kinerja untuk indikator angka Kontribusi UKM terhadap PDRB sesuai dengan hasil yang di capai pada tabel 3.2. "contoh" Kontribusi UKM terhadap total PDRB pada tahun 2025 realisasi yang di capai sebesar 71,52 % dengan capaian kinerja 121,22 % dibandingkan dengan tahun 2024 dari target 21 yang terealisasi 37,83 dengan capaian kinerja 180,14% hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 menurun di bandingkan dengan capaian tahun 2024 hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 anggaran yang ada kurang sehingga target tahun 2025 tidak memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masih masuk pada kategori "BERHASIL".

Capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra 2025 mencapai 121,22 % untuk angka Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB

Capaian ini sesuai dengan target awal selama lima tahun kedepan dimana peningkatan akses dan kualitas Koperasi dan UKM diharapkan stabil selama lima tahun kedepan.

Capaian kinerja pada tahun 2024 lebih besar dari capaian kinerja pada tahun 2025 ini terjadi disebabkan :

- Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah sedikit

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel. 3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen Restra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025		
					Target	Realisasi	%
Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	100	159.63	119,63	180.14	59	71.52	121.22

Capaian Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB berdasarkan table diatas Kontribusi UKM Tahun 2021 – 2025 berdasarkan Tabel diatas Capaian Tahun 2021 sebesar 100 dari target 19 , Capaian Tahun 2022 sebesar 159.63 dari target 19, Capaian Tahun 2023 119.63 dari target 21 dan Capaian tahun 2024 sebesar 180.14 dari target 21, Capaian Tahun 2025 180,14 dari target 59 berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB dari Tahun 2021 – 2025 mengalami kenaikan dan tiap tahun dengan capaian kinerja baik

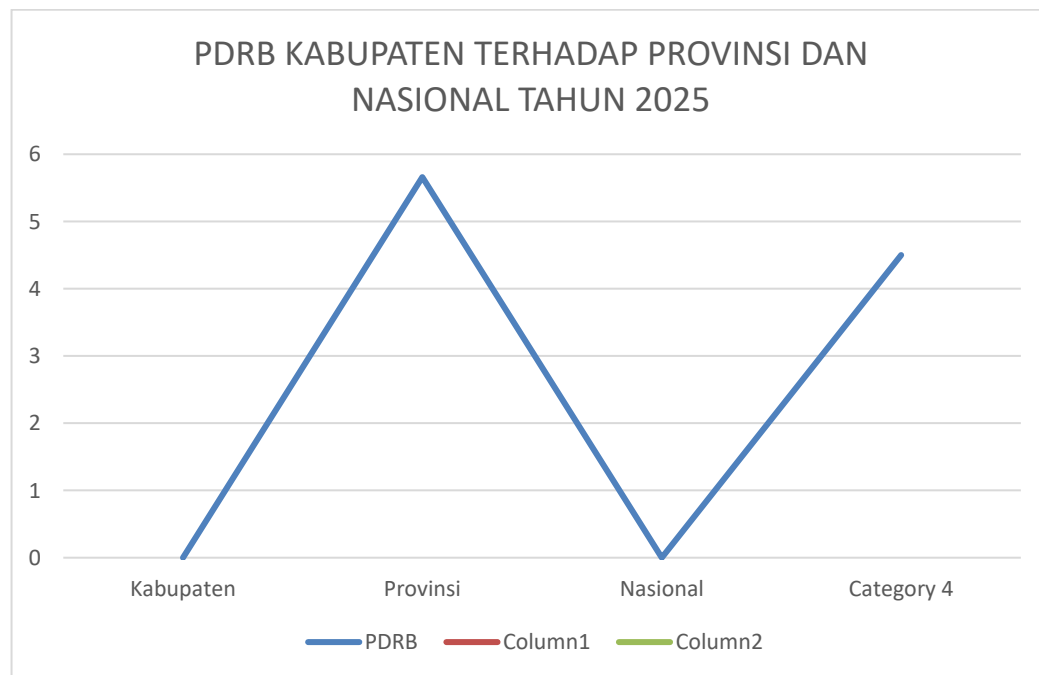


Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja dari tahun 2021 – 2024 mengalami Kenaikan dan menurun pada Tahun 2025 hal ini disebabkan dana yang ada yang diberikan oleh Pemerintah berkurang akan tetapi untuk tahun 2024 capaian kinerja mengalami kenaikan yang signifikan karena dana yang diberikan oleh Pemerintah besar sehingga tingkat kinerja ASN Dinas Koperasi dan UKM juga meningkat.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

NO	INDIKATOR	KABUPATEN	PROVINSI	NASIONAL
	Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	121.22	5.66%	5.11%

Sumber : - Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2024
- Capaian Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa bukti kongkrit kontribusi sector Koperasi dan UKM bagi Perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dalam hal ini menekan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian angka dalam hal ini tentu saja membawa dampak yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow yang semakin membaik dari waktu ke waktu dimana realisasi yang dicapai lebih tinggi yaitu 121.22 % hal ini tidak sangat rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara 5,66% dan target nasional yakni 5.11%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan :

1. Minimnya bantuan bagi pelaku UMKM dan sehingga para pelaku UMKM tidak dapat mengembangkan usaha yang mereka lakukan sehingga diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dapat memberikan Bantuan kepada para Pelaku UMKM agar usaha yang mereka lakukan tidak mati sehingga para pencari kerja juga dapat bertahan hidup
2. Dari segi UMKM terjadi peningaktan UMKM dari 6000 UKM yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow menjadi 12.875 UKM yang dilakukan melalui Pendataan UKM

6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber daya

Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Capaian Efisiensi Sumber Daya
Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB	121.22	71.52	59

Dari Tabel diatas bila dilihat bahwa capaian Kinerja Tahun 2025 yatiu 121.22 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 71.52 % maka capaian efisiensi Sumber Daya adalah 59 hal ini terjadi karena adanya Program Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Anggaran yang diberikan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Data tersebut maka capaian Efisiensi Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan dari Kegiatan tersebut adalah :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	24.165.015	23.758.180	98.32%
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	24.165.015	23.758.180	98.32%
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	24.165.015	23.758.180	98.32%
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	38.864.994	35.834.202	92.20%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	38.864.994	35.834.202	92.20%
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	38.864.994	35.834.202	92.20%
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.599.787	6.407.943	97.09%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	6.599.787	6.407.943	97.09%
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	6.599.787	6.407.943	97.09%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	20.045.056	18.825.775	93.92%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	20.045.056	18.825.775	93.92%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4.961.100	4.425.000	89.19%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15.083.956	14.400.775	95.47%

Tabel 7.1.
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
POSISI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.373.578.126	2.229.934.290	93.94
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.283.903.274	2.145.108.190	93.92
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.051.095.553	1.926.360.542	93.92
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.008.935.774	1,884.335.746	93.80
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.335.363	30.334.186	99.99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.824.416	11.690.610	98.87
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	14.152.500	11.200.000	79.14
	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	14.152.500	11.200.000	79.14
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.869.104	81.320.898	99.33
	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.170.000	1.170.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.094.349	830.700	75.91
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.604.755	79.320.198	99.64
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.347.618	42.452.775	9.55
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.347.618	32.467.500	94.53
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	410.000.000	9.984.274	2.44
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.000.000	63.000.000	88.73
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.000.000	63.000.000	88.73
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.786.117	63.226.750	96.11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	64.121.117	61.633.900	96.12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.665.000	1.592.850	95.66

	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	24.165.015	23.758.180	98.32
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24.165.015	23.758.180	98.32
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	24.165.015	23.758.180	98.32
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	38.864.994	35.834.202	92.20
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	38.864.994	35.834.202	92.20
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Kewenangan Kabupaten/Kota	38.864.994	35.834.202	92.20
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	6.599.787	6.407.934	97.09
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	6.599.787	6.407.934	97.09
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	6.599.787	6.407.934	97.09
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	20.045.056	18.825.775	93.92
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	20.045.056	18.825.775	93.92
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4.961.100	4.425.000	89.19
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15.083.956	14.400.775	95.47
	J U M L A H	2.373.578.126	2.229.934.290	93.94%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow 2025-2029 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Kelompok dan klaster ialah **Berhasil**. Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM tahun 2025 mencapai 71,52%, dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,94% dan realisasi belanja langsung sebesar 93.92%.

B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

(Menjelaskan beberapa indikator yang belum berhasil mencapai target) Contoh "Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah **Berhasil**, akan tetapi secara indikator sasaran khususnya pada capaian angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) belum semuanya memenuhi target 100%. Untuk indikator sasaran Kontribusi UKM Terhadap Total PDRB (KUKMTTPDRB), meskipun capaian tahun 2025 sudah melebihi target, akan tetapi belum berada pada kondisi yang ideal. Capaian KUKMTTPDRB tahun 2025 ialah 121.22%, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan UKM sangatlah tinggi, melebihi dari rencana (c o n t o h) Hal ini diduga disebabkan karena **perkembangan UKM cukup tinggi, munculnya UKM cukup banyak, kesadaran masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui UKM cukup tinggi** . Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2029.